MPP

2025

PERATURAN BUPATI (PERBUP) BD KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NO 11

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NO 11 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN
MAL PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu lokasi, menjamin kepastian hukum, serta meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna.
- Dasar Hukum UUNomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 201, UU Nomor 13 Tahun 2022, UU Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021
- Merupakan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, penyedia layanan, dan mekanisme operasional MPP, termasuk jenis layanan, sumber daya manusia, dan sumber pendanaan. menekankan prinsip-prinsip seperti koordinasi, akuntabilitas, dan kenyamanan pengguna, sekaligus mewajibkan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penyediaan layanan.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 6 Mei 2025